

**ANALISIS PENYESUAIAN TARIF PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (NO. 122/PMK.010/2015)
ATAS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN
PPH 21 MASA PT. KPN**

JURNAL



PRO PATRIA

Disusun Oleh:

Nama : Budia Indah Ningrum

NIM : 01112080

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NAREOTAMA
SURABAYA**

2016

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	
KATA PENGANTAR	i
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN <i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Masalah	6
1.4 Manfaat Masalah	7
1.5 Batasan Masalah	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.1 Kerangka Teori	14
2.2.1 Dasar-dasar Pajak	14
2.2.1.1 Pengertian Pajak	14
2.2.1.2 Fungsi Pajak	14
2.2.1.3 Cara Pemungutan Pajak	15
2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.2.1.5 NPWP	17

2.2.1.6 Surat Pemberitahuan (SPT)	18
2.2.2 Penyetoran PPh 21	20
2.2.3 Pelaporan PPh 21	21
2.2.4 Pajak Penghasilan	23
2.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21	24
2.2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	24
2.2.5.2 Saat Terutang Pajak	25
2.2.5.3 Pemotong Pajak PPh 21	25
2.2.5.4 Subjek Pajak Penghasilan	26
2.2.5.4.1 Penerimaan Penghasilan yang Dipotong PPh 21	26
2.2.5.4.2 Pengecualian sebagai Penerima Penghasilan	28
2.2.5.5 Objek Pajak PPh 21	28
2.2.5.5.1 Penghasilan yang dipotong PPh 21	28
2.2.5.5.2 Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh 21	29
2.2.5.5.3 Penghasilan yang Dipotong PPh 21 Final	30
2.2.5.6 Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21	31
2.2.5.6.1 Dasar Pengenaan PPh 21	31
2.2.5.6.2 Pemotongan PPh 21	32
2.2.5.6.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ...	34
2.2.5.7 Tarif Pemotongan PPh 21	35
2.2.5.7.1 Tarif Pemotongan PPh 21 Memiliki NPWP	35
2.2.5.7.2 Tarif Pemotongan PPh 21 tidak Memiliki NPWP	36
2.2.4 Pengaruh Kenaikan PTKP	37
2.3 Kerangka Konsep Pemikiran	40

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1	Pendekatan Penelitian	41
3.2	Situasi Sosial.....	42
3.3	Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data	42
3.3.1	Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan	42
3.3.2	Teknik Pengumpulan Data	43
3.4	Definidi Operasional	44
3.5	Desain Instrumen	45
3.6	Teknik Analisa Data	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Deskripsi Oprasional.....	49
4.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan	49
4.1.2	Visi dan Misi	49
4.1.3	Jenis Usaha	50
4.1.4	Struktur Organisasi	51
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	54
4.2.1	Data Karyawan 2014 PT. KPN	58
4.2.2.1	Perhitungan PPh 21 PT. “KPN” bulan Desember 2015.....	60
4.2.2	Data Karyawan 2015 PT. KPN.....	62
4.2.2.1	Perhitungan PPh 21 Bulan Januari 2015 PT. KPN.....	64
4.2.2.2	Perhitungan PPh 21 Bulan Februari 2015 PT. KPN	66
4.2.2.3	Perhitungan PPh 21 Bulan Maret-Juni 2015 PT. KPN.....	68
4.2.3	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Desember 2014	70
4.2.4	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Januari 2015	71
4.2.4	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Februari2015	71
4.2.5	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Maret-Juni 2015	73
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	74
4.3.1	Perhitungan PPh 21 Karyawan Bulan Desember 2015	75
4.3.2	Perhitungan PPh 21 Bulan Januari-Juni 2015	77
BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	109



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN
PADA HARI SABTU TANGGAL 30 JULI 2016

Judul Skripsi : "ANALISIS PENYESUAIAN TARIF PENGHASILAN
TIDAK KENA PAJAK SESUAI PERATURAN
MENTERI KEUANGAN (NO.122/PMK.010/2015) ATAS
PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PPH 21 MASA PT. KPN"

Disusun Oleh : Budia Indah Ningrum
NIM : 01112080
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Prodi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Narotama

Dihadapan Team Penguji :

1. NURUL AINI, S.E, Ak, M.Ak

.....

2. RONY WARDHANA, S.E., M.Ak., CPAI

.....

3. Dr. AGUS DWI SASONO, S.E., M. Si., Ak

.....

ABSTRAK

**“ANALISA PENYESUAIAN TARIF PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK SESUAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (NO.122/PMK.010/2015) ATAS
PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH 21 MASA
PT. KPN”**

Oleh:

Budia Indah Ningrum

Dosen Pembimbing:

Rony Wardhana, S.E., M.AK, CPAI

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan berupa imbalan kerja yang termasuk objek PPh pasal 21. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan perusahaan tersebut terhadap kepatuhan penerapan penyesuaian tarif penghasilan tidak kena pajak terbaru berdasarkan PMK no. 122/pmk.010/2015 dengan PTKP lama. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif data yang dikumpulkan berupa dokumen, gambar, catatan lapangan dan kualitatif yang digunakan adalah menghitung PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif PTKP lama dan tarif PTKP baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. KPN dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 belum sesuai dengan prosedur peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan terdapat selisih dari perhitungan PPh pasal 21 dengan sampel yang diteliti. PT. KPN perlu adanya pemahaman akan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perpajakan, agar tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 yang mengakibatkan terjadinya lebih bayar atau kurang bayar atas PPh pasal 21 yang disetor dan dilaporkan.

Kata kunci : Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak, Peraturan Perpajakan

ABSTRACT

**"ANALYSIS OF ADJUSTMENT IS NOT TAXABLE INCOME RATES ACCORDING TO
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE (122 / PMK.010 / 2015) THE
CALCULATIONS, CUTTING, DEPOSIT AND REPORTING PERIOD PPH 21
PT. KPN "**

**By:
Budia Indah Ningrum**

**Advisor Lecturer:
Rony Wardhana, S.E., M.AK, CPAI.**

Taxes are a source of state revenue. Article 21 income tax is a tax imposed on the subject of taxes on income in the form of employee benefits including Income Tax object Article 21. The purpose of this study to determine the calculation of income tax Article 21 by the company to compliance of the application of the tariff adjustment taxable income the most by PMK No. , 122 / PMK.010 / 2015 PTKP old. Research using qualitative descriptive methods. Descriptive data collected in the form of documents, drawings, field notes and qualitative used is to calculate the income tax Article 21 using PTKP rates of old and new PTKP rates. The results showed that PT. KPN in the calculation of income tax article 21 is not in accordance with the procedures existing regulations. This is because there is a difference from the calculation of income tax Article 21 with the studied sample. PT. KPN is necessary to understand the rules and procedures established by the Director General of Taxation, that there are no errors in the calculation of income tax Article 21 that resulted in an overpayment or underpayment of income tax Article 21 paid and reported.

Taxes Keywords: tax, Income tax article 21, non-taxable income rate, tax regulations

PRO PATRIA

SURABAYA

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang sudah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diungkapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) PT. “KPN” sudah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, akan tetapi PT. “KPN” dalam melakukan perhitungan PPh 21 belum sesuai dengan peraturan Dirjen pajak yang ada.
- 2) PT. “KPN” sudah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, akan tetapi PT. “KPN” dalam melakukan pemotongan PPh 21 belum sesuai dengan peraturan Dirjen pajak yang ada.
- 3) Penyetoran PPh 21 PT. “KPN” belum dilakukan dengan benar sesuai peraturan Dirjen pajak, yaitu PPh 21 terutang masa pajak perbulan ada yang dibayar melebihi waktu jatuh tempo sesuai peraturan Dirjen pajak (10 hari setelah masa pajak).
- 4) Pelaporan PPh 21 PT. “KPN” sudah dilakukan dengan benar sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dirjen pajak, yaitu pelaporan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak 20 hari setelah masa pajak dengan menggunakan SPT bentuk formulir kertas (*hard copy*), karena gaji bruto karyawan PT. “KPN” yang terdaftar dalam perhitungan PPh 21 dalam bulan Desember 2014 sebanyak 7 orang dengan rincian 4 memiliki NPWP dan 3 orang tidak memiliki NPWP. Bulan januari karyawan PT. “KPN” yang masuk dalam pemotongan PPh 21 sejumlah 3 orang.
- 5) Perhitungan PPh 21 PT. “KPN” dalam bulan Desember 2014 Terdapat perbedaan dengan prosedur peraturan perpajakan yang ada, dimana dalam perhitungan PPh 21 PT. “KPN” hanya dilakukan kepada karyawan yang memiliki NPWP. Akibat yang timbul yaitu

selisih kurang bayar penyeteroran PPh 21 PT. "KPN" sebesar Rp. 35.363,00,- dari jumlah PPh dipotong yang disetor perbulan Rp. 375.000,00 menjadi Rp. 410.363,00,- perbulan.

- 6) Perhitungan PPh Pasal 21 Masa pada PT "KPN" di Bulan Januari 2015 antara tarif PTKP baru dengan yang lama. Perhitungan PPh pasal 21 PT. "KPN" dalam penerapan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bulan Januari 2015. Perbandingan yang timbul dari perhitungan atas penerapan tarif PTKP terbaru dan PTKP lama adalah Rp. 6.007.500,00 PPh terutang selama setahun menjadi Rp. 3.960.000,00 dan PPh dipotong perbulan Rp. 500.626,00 menjadi Rp. 330.000,00 dari hal tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 170.626,00 per-bulan, lebih kecil dengan menerapkan PTKP baru dalam pemotongannya. Akumulasi PPh 21 yang dipotong per-bulan dari bulan Januari sampai Juni 2015 yang dibayarkan oleh PT. "KPN" terdapat lebih bayar sebesar Rp. 170.624,00. Jumlah PPh terutang yang telah dibayar oleh PT. KPN sebesar Rp. 3.003.750,00,- dan seharusnya PT. "KPN" hanya membayar Rp. 1.980.000,00 jika sudah menerapkan tarif PTKP terbaru dari bulan januari 2015.
- 7) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 belum memenuhi prosedur peraturan Dirjen Pajak, karena perhitungan PPh 21 PT. "KPN" hanya dilakukan terhadap karyawan yang memiliki NPWP saja, sedangkan untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP tidak dilakukan perhitungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gosal, A. R. (2013). Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21. ISSN 2303-1174, 1-10. Fakultas Ekonomi-Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id> (Download, 6 Oktober 2015).
- Lumintang, A.T; Tinangon, J. J. dan Inggriani, E. (2014). Evaluasi Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis-Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id>. (Download, 6 Oktober 2015).
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Andi Yogyakarta.
- Pantow, A.K. (2013). Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21. Fakultas Ekonomi-Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id> (Download, 4 Oktober 2015).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 122/PMK.010/2015. Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. <http://www.kemenkeu.go.id> (Download, 4 November 2015).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. <http://www.ortax.org> (Download, 4 Oktober 2015).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-14/PJ/2013. Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. <http://www.ortax.org> (Download, 16 Juni 2016).
- Moleong, M. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. <http://www.dpr.go.id>. (Download, 6 Oktober 2015).
- Salim, M. dan Syafitri, L. (2013). Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. Jurnal Akuntansi Stie Mdp.. <http://eprints.mdp.ac.id> (Download, 6 Oktober 2015).
- Sinurat, M. (2013). Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PP. PLN (Persero) Cabang Medan. ISSN 2339-1723, 1-13. <http://www.stiebinakarya.ac.id> (Download, 6 Oktober 2015).
- Sugiyono (2013). Memahami Penelitian Kombinasi. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono (2015). Memahami Penelitian Kombinasi. Alfabeta Bandung.
- Susan , J. (2013). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt. Megasurya Nusalestari Manado . Emba ISSN 2303-1174, 1-9. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis-Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id> (Download, 5 Oktober 2015).

Watung, D. N. (2013). Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan. ISSN 2303-1174,1-9.
Jurnal Fakultas Ekonomi-Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
[.http://portalgaruda.org/article.php](http://portalgaruda.org/article.php). (Download, 4 Oktober 2015).

Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.

